



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 22 Mei 2017

Halaman: 1

Analisis KR
Toleransi Kota Budaya
Indra Tranggono

UNTUK kedua kalinya Haryadi Suyuti menjadi Walikota Kota Yogyakarta. Kali ini berpasangan dengan Heroe Poerwadi. Hari ini, Senin (22/5) dilantik. Masyarakat sangat berharap Haryadi-Heroe mampu memimpin Kota Yogyakarta secara kultural. Yakni, menjalankan kebijakan politik berbasis nilai-nilai kebudayaan yang meliputi sistem religi/budaya spiritual, sosial-politik, mata pencaharian, teknologi, sistem komunikasi, lingkungan, tata ruang/arsitektur, kesenian, bahasa/sastra, ekonomi, pendidikan, tradisi dan lainnya. Seluruh sistem tersebut dijalankan melalui politik budaya, regulasi dan politik anggaran yang bertujuan meraih pelayanan berkualitas bagi publik. Buahnya, adalah kesejahteraan sosial, ekonomi dan kultural.

Ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya, masih tingginya tingkat intoleransi di kota budaya ini. Ini ironis. Karena Kota Yogyakarta telah mengklaim diri sebagai city of tolerance. Yakni, pikiran, sikap dan perilaku kelompok tertentu yang belum mampu menerima, menghargai dan menjamin hak-hak kelompok lain karena alasan perbedaan.

* Bersambung hal 8 kol 1

Toleransi

Perbedaan masih dipahami sebagai 'ancaman' atau 'gangguan', bagi kelompok yang cenderung mengutamakan penyeragaman atau homogenitas budaya. Padahal, perbedaan merupakan keniscayaan kultural dalam kehidupan bangsa yang multietnik dan plural. Hal ini dijamin ideologi negara (Pancasila), konstitusi (UUD 45), NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menjaga Kota Yogyakarta tetap berwatak toleran bisa melalui beberapa cara. Pertama, penguatan karakter sumber daya manusia melalui edukasi yang menekankan perluasan wawasan tentang pluralism. Kemudian membangun kesadaran atas toleransi, membangun nilai-nilai inklusivitas (keterbukaan) antarstakeholder sosial-budaya, membangun sinergi kreatif, membangun rasa saling percaya antar kelompok yang berbeda dan lainnya.

Kedua, membangun dan memperkuat kelembagaan sosial dan budaya di masyarakat.

rakat yang berbasis pada spirit kebhinnekaan. Misalnya dengan menciptakan atau memperkuat forum-forum komunikasi yang kinerjanya mampu melakukan peningkatan potensi masyarakat. Dengan terjalinnya relasi melalui berbagai forum maka masyarakat bisa saling mengenal dan memahami serta melakukan dialog nilai-nilai. Dampaknya, konflik horizontal, dapat ditekan. Semua itu bisa diwujudkan melalui pelbagai program kegiatan yang kontinyu, intens, dan dijalankan secara profesional-dedikatif.

Masyarakat yang bersifat intoleran biasanya adalah masyarakat yang tidak berada dalam kesadaran membangun peradaban. Mereka tidak disapa oleh negara, sehingga mencari jalan sendiri untuk mengaktualisasi diri. Selain itu, masyarakat intoleran adalah juga kelompok sosial yang cenderung memperjuangkan egoisme sektoralnya baik atas nama kepentingan politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Mereka lupa bahwa di luar dirinya ada lyan (the others) yang juga punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, mereka juga belum tahu cara menghargai lyan itu karena tidak mendapatkan edukasi tentang mengelola perbedaan berbasis prinsip nilai lya self.

Sikap menganggap kelompoknya paling benar pengaruh pada budaya penggunaan media sosial (medsos). Hal ini tampak pada sebagian publik pengguna medsos terjadi liberalisasi opini dan informasi tanpa etika. Hingga tak bisa dibedakan antara informasi, opini dengan provokasi. Problem budaya komunikasi ini juga jadi tantangan Haryadi-Heroe. Menurut Kapolda DIY Ahmad Dofri, berdasarkan data tahun 2016 ada 800 ribu situs berita hoax. Selama satu bulan, situs tersebut menyebarkan 66.666 berita palsu. Sedang dalam waktu satu menit satu situs menuliskan dua berita hoax. Pada awal tahun 2017, Yogyakarta termasuk dalam tiga terbesar penyebar hoax di Twitter. Adapun 10 besar kota penyebar hoax adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bogor, Bekasi, Medan, Malang, Tangerang dan Semarang.

Haryadi-Heroe, tentu akan berkonsentrasi pada kualitas pelayanan atas publik. Namun hal yang tidak boleh dilupakan adalah memperkuat basis nilai kebudayaan demi membangun sikap mental masyarakat Yogyakarta yang berperadaban tinggi. Hal itu bisa ditempuh misalnya dengan menciptakan berbagai ruang kemungkinan secara sosial-budaya, fask-non fask bagi publik. Sehingga publik menemukan ruang edukasi, ekspresi dan kreasi serta ruang dialog nilai-nilai yang bermakna. Kultur toleransi pun terjaga sehingga Yogyakarta pun tetap layak menyandang predikat city of tolerance. (Penulis adalah pejabat daerah)

☐ Negatif ☐ Amat Segera
☐ Positif ☐ Segera
☐ Netral ☐ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005